

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu permasalahan yang pasti timbul dalam pembangunan, walaupun pada dasarnya ketimpangan ekonomi adalah inherent dengan proses pembangunan itu sendiri Hasan Azis (2018), Indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan suatu daerah yaitu dilihat dari proses pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya setiap negara memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tetapi pada kenyataannya di negara berkembang seperti Indonesia sering terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di seluruh daerah, sehingga menyebabkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah apabila dibandingkan dengan daerah lainnya. Ketimpangan pada dasarnya disebabkan adanya perbedaan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat adanya perbedaan ini potensi atau kemampuan pada suatu wilayah mendorong proses pembangunan yang berbeda pula. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada suatu wilayah biasanya terdapat wilayah maju.

Ada tiga nilai inti pembangunan, yaitu kecukupan (survival life), harga diri (self-harga diri), dan kebebasan (freedom). Selain itu, tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan distribusi berbagai kebutuhan dasar, meningkatkan taraf hidup dan memperluas pilihan ekonomi dan sosial Todaro dan Smith (2006).

Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang stagnan, tetapi memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi paling rendah ke-dua di antara provinsi provinsi lain di pulau Jawa. Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan provinsi provinsi lain di pulau Jawa disebabkan oleh tingginya ketergantungan pada industri pengolahan, kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, rendahnya

kualitas sumber daya manusia, dan terbatasnya mobilitas tabungan masyarakat Bappenas, (2018).

Ketimpangan pendapatan antar daerah timbul akibat tidak meratanya distribusi pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antar daerah, yakni ada daerah maju dan ada daerah tertinggal. Salah satu cara untuk mengidentifikasi ketimpangan regional adalah dengan menghitung indeks Williamson yang menguji hubungan antara ketimpangan regional dan pendapatan per kapita. Oleh karena itu, dalam menghitung Indeks Williamson, indikator utamanya adalah pendapatan per kapita. Ketimpangan antar provinsi di Pulau Jawa masih relatif tinggi.

Menurut Sjafrizal (2014), faktor faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Oleh karena itu pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (Developed Region) dan wilayah terbelakang (Underdeveloped Region) Sjafrizal, (2014). Teori ini sejalan dengan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu penyebab ketimpangan di negara berkembang yaitu kesenjangan antara warga yang berpendapatan relatif tinggi dengan yang berpendapatan rendah. Faktor yang mendorong adanya ketimpangan di Jawa Tengah menurut Hidayah & Tallo (2020) antara lain migrasi kelompok produktif dan terdidik ke daerah berkembang, adanya investasi ke daerah yang lebih maju, serta kebijakan pemerintah yang fokus pada kegiatan sosial dan ekonomi kapital di daerah berkembang. Di Indonesia, upaya mengatasi masalah ketimpangan distribusi pendapatan dengan menggunakan koefisien Gini cukup berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien Gini yang turun dari 0,38 persen pada tahun 1978 menjadi 0,32 persen pada tahun 1990 (Bank Dunia, dalam Morer, 1995). Provinsi Jawa tengah adalah bagian dari Indonesia yang berada di pulau jawa dan tidak terlepas dari masalah ketimpangan ekonomi. Hal ini disebabkan karena karakteristik yang berbeda antara setiap provinsi. Provinsi yang memiliki pengaruh kuat akan menciptakan model pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Ketimpangan ini mempengaruhi kemampuan suatu daerah untuk tumbuh, menyebabkan beberapa daerah

tumbuh dengan cepat sementara yang lain tumbuh lambat. Kapasitas pertumbuhan ini akan menimbulkan ketimpangan baik dalam pembangunan maupun pendapatan antar daerah, oleh karena itu pemerintah daerah dapat mengurangi ketimpangan pembangunan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ekonom institusional berpendapat bahwa upah minimum dapat mengurangi ketimpangan. Ketika upah minimum ditetapkan maka standar upah akan menjadi lebih tinggi dan terciptalah distribusi upah dan pendapatan yang lebih luas, serta distribusi upah dan pendapatan yang lebih merata (Bluestone e Harrison, 2001: 58). Berikut adalah data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2020.

**Table 1.1 PAD Di 3 Provinsi Pulau Jawa**

Provinsi	2017	2018	2019	2020
Jawa Barat	17.102	19.642	21.244	25.223
Jawa Timur	17.324	18.531	19.327	17.951
Jawa Tengah	12.547	13.711	14.112	13.669

*Sumber: BPS 2017-2020 diolah*

Peningkatan pendapatan asli daerah adalah tugas wajib yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah supaya mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. PAD dibuat sebagai sumber APBD yang dimana dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa mengurangi tingkat ketimpangan.

Menurut data tabel 1.1 menunjukkan bahwa, Jawa Tengah memiliki jumlah PAD yang terendah dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. PAD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2019 sempat mengalami kenaikan dari 12.547 hingga 14.112 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 13.669. Ini merupakan pertanda yang negatif karena jumlah PAD tidak meningkat setiap tahunnya, maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jateng juga akan ikut turun seiring dengan turunnya PAD.

Hartini (2017) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil jika suatu daerah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi

dan merata meningkatkan taraf hidup masyarakatnya atau lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendah atau tingginya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduknya, sebaliknya semakin rendah pula tingkat produktivitas penduduknya. semakin rendah tingkat produktivitasnya. penduduk, sehingga meningkatkan tingkat pendapatan.

Permasalahan yang muncul adalah adanya perbedaan Indeks Pembangunan Manusia tiap daerah. Hal ini menjadikan Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah. Tiga indikator yang diukur dengan perbandingan IPM adalah kualitas hidup, tingkat pendidikan dan standar hidup, dan ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi. Seluruh provinsi di Pulau Jawa mempunyai indeks pembangunan manusia sedang (nilai IPM antara 60 dan 69,9), bahkan ada beberapa provinsi yang tergolong tinggi (nilai IPM antara 70 dan 79,9). Selain itu, nilai IPM di seluruh provinsi di Pulau Jawa semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan nilai IPM belum mengatasi kesenjangan wilayah di Provinsi Jawa. Nilai IPM yang semakin tinggi tidak dibarengi dengan pemerataan pendapatan maka akan menurunkan kesejahteraan seluruh masyarakat dan menimbulkan ketimpangan wilayah. Berikut ini adalah statistik yang diperoleh oleh Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Tengah terhadap laju perkembangan IPM tiga tahun terakhir 2016-2020.

**Table 1.2 IPM Provinsi Jawa Tengah**

Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020
Jawa Tengah	69,98	70,52	71,12	71,7	71,87
				3	

sumber: BPS Jateng 2020

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan manusia di Jawa Tengah dari tiga tahun terakhir 2016-2020 secara umum mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena kualitas pembangunan manusia semakin meningkat dan potensi sumber daya manusia semakin meningkat, meskipun tidak didukung oleh penyerapan tenaga kerja yang optimal. Tingkat

pertumbuhan IPM di Jawa Tengah sendiri cukup tinggi dan perlu adanya peningkatan pembangunan manusia melalui berbagai program seperti kesehatan, pendidikan, harapan hidup. Untuk mencapai hal tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus memperhatikan faktor pendukung lainnya, seperti kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia itu sendiri.

Faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan adalah Pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran di beberapa kab/kota menjelaskan bahwa masih terdapat faktor produksi yang belum digunakan secara optimal dalam menunjang pembangunan. Rendahnya partisipasi tenaga kerja yang terlihat dari TPT serta rendahnya PDRB per kapita di beberapa daerah akan berdampak tidak hanya pada kesejahteraan masyarakat saja, tetapi juga pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang terhambat tentunya akan mempengaruhi pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Dari data yang didapatkan (Badan Pusat Statistik Jawa Tengah) bisa kita ketahui bahwa persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2016-2020 yang disajikan dalam gambar sebagai berikut:

**Table 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020
Jawa Tengah	4,63	4,57	4,47	4,44	6,48

*sumber: data bps jateng dalam angka 2020*

Tabel diatas menunjukkan bahwa empat tahun terakhir yaitu pada tahun 2016-2019 tingkat pengangguran di jawa tengah setiap tahunnya mengalami penurunan dan mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2020 yaitu, sebesar 6,48%. Hal tersebut menunjukkan bahwa harus ada upaya untuk mengatasi pengangguran supaya tidak ada lagi pengangguran di provinsi jawa tengah, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan

meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan agar masyarakat dapat memiliki kehidupan yang layak.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2016-2020”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2020?

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah dan agar dapat berfokus pada tujuan penelitian, maka ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini yaitu mengamati kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan tahun pengamatan 2016-2020. Variabel yang diteliti adalah ketimpangan pendapatan, pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pendapatan Asli Daerah.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengungkap sasaran yang akan dicapai dengan menganalisis suatu masalah yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka substansi dari tujuan penelitian ini mengarah pada isi serta rumusan masalah dalam penelitian. Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap ketimpangan pendapatan Di Jawa Tengah pada tahun 2016-2020.

## **E. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian pastinya mempunyai manfaat yang berguna bagi lembaga pendidikan, instansi yang digunakan sebagai objek penelitian dan juga dapat berguna bagi peneliti itu sendiri. Adapun kegunaan (manfaat) penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah**

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah atau pihak terkait untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan daerah.

## **2. Bagi peneliti**

Sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah yang sama, serta sebagai wahana penerapan pemahaman penulis terhadap teori-teori yang diperoleh selama kegiatan membaca di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.

